

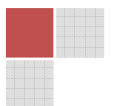


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN TAHUNAN

2017

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Rencana Strategik	3
1.3.1 Visi dan Misi	3
1.3.2 Tujuan, Sasaran dan Strategis	4
BAB II GAMBARAN UMUM	5
2.1 Struktur Organisasi	5
2.2 Uraian Tugas	6
2.2 Kepegawaian	7
2.3 Sarana dan Prasarana, serta Aset	9
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN URUSAN PENANAMAN MODAL	13
3.1 Pengemb. Potensi Unggulan Daerah	14
3.2 Perenc. dan Pengembangan Penanaman Modal	15
3.3 Penyelenggaraan Pameran Investasi	15
3.4 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan PM	16
3.5 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dibidang Investasi	18
3.6 Pengemb. Sistem Informasi Penanaman Modal	18
3.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	19
3.8 Bimbingan Pelaksanaan Pelayanan PM	19
3.9 Penatalaksanaan dan Perenc. Program	20
BAB IV PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT (SOLUSI)	21
4.1 Permasalahan	21
4.2 Rencana Tindak Lanjut (Solusi)	21
BAB V PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Program dan Kegiatan BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan	2
2. Jumlah Pegawai dan Komposisi Pendidikan Per 31 Desember 2014	8
3. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional per 31 Desember 2014	8
4. Jumlah PNS menurut Tingkat Golongan per 31 Desember 2014	9
5. Sarana dan Prasarana yang ada per 31 Desember 2014	9



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Laporan Tahunan adalah laporan pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus disusun dalam setiap akhir tahun anggaran sebagai laporan kinerja Tahunan. Dengan Laporan Kinerja Tahunan dapat diketahui sejauh mana hasil pencapaian kinerja, diketahui sejauh mana hasil pencapaian kinerja suatu SKPD dibandingkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga laporan kinerja tahunan tersebut sebagai informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk tahun yang akan datang disamping itu juga untuk memenuhi keterbukaan informasi publik.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan urusan pemerintahan wajib dibidang penanaman modal dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang tersusun dalam program, kegiatan operasional yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dana Dekonsentrasi yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat. Pada tahun anggaran 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 7.359.037.000,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) terdiri dari:



Tabel 1. Program dan Kegiatan BKPMD Provinsi Kal Sel

No	Program	Kegiatan
1.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah b. Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal c. Penyelenggaraan Pameran Investasi d. Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	a. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi b. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan d. Bimbingan Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal e. Penatalaksanaan dan Perencanaan Program

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Keberadaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Peringkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan.



Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal.
- c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal.
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan penanaman modal.
- e. Perumusan kebijakan operasinal, pembinaan dan pelaksanaan pengendalian penanaman modal.
- f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

3. Rencana Strategik

1. Visi dan Misi

Visi dan misi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 ditetapkan sesuai dengan Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Visi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah : ***“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Tujuan Investasi Yang Menarik”***.

Berdasarkan visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:



- a. Mendorong terciptanya kondisi dan iklim usaha yang kondusif, hingga memacu investasi.
- b. Meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal.
- c. Meningkatkan pelayanan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- d. Meningkatkan kelembagaan dan fasilitas sarana dan prasarana informasi penanaman modal.
- e. Membangun kawasan-kawasan andalan sebagai daya tarik investasi.
- f. Meningkatkan kemampuan SDM untuk menjadi profesional.

2. Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diharapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat setempat.
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui PDRB per kapita.
- c. Meningkatnya kualitas informasi yang disampaikan kepada investor / calon investor.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia.
- e. Berkembangnya kawasan-kawasan andalan di wilayah Kalimantan Selatan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari periode 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya kenyamanan dan rasa aman berinvestasi di daerah.
- b. Terkoordinirnya kegiatan Perencanaan dan pelaksanaan Penanaman Modal di daerah.
- c. Termonitornya kegiatan Penanaman Modal di daerah.
- d. Tersusun dan tersebarnya Kawasan Andalan di wilayah Kalimantan Selatan.



BAB II

GAMBARAN UMUM

1. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Selatan Nomor.6 Tahun 2008.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan selatan Nomor 024 Tahun 2009, unsur-unsur organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah Priovinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Promosi Penanaman Modal
- 3) Bidang Pelayanan dan Pengembangan , Penanamam Modal
- 4) Bidang Pengendalian Penanaman Modal ; dan
- 5) Kelompok Jabatan fungsional.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub bagian Umum dan kepegawaian

Bidang Promosi Penanaman Modal

- a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data
- b. Sub Bidang Promosi

Bidang Pelayanan dan Pengembangan Penanaman Modal

- a. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal
- b. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal



Bidang Pengendalian Penanaman Modal

- a. Sub Bidang Pembinaan Penanaman Modal ; dan
- b. Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal

2. URAIAN TUGAS :

1. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.
2. Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data penanaman modal serta promosi penanaman modal .
3. Bidang Pelayanan dan Pengembangan , Penanamam Modal mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal, kerjasama dan pengembangan iklim penanaman modal
4. Bidang Pengendalian Penanaman Modal ; dan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal
5. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
6. Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
7. Sub Bagian Keuangan empunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan.



8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian.
9. Sub Bidang Pullahta Penanaman Modal Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data serta evaluasi dan laporan kegiatan Badan.
10. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan promosi potensi daerah dan penyusunan profil investasi daerah komoditi unggulan.
11. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan penanaman modal.
12. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan dan fasilitas kerjasama dan pengembangan iklim penanaman modal.
13. Sub Bidang Pembinaan Penanaman Modal Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi pelaksanaan penanaman modal.
14. Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, evaluasi, pelaporan, kegiatan pelaksanaan penanaman modal

3. KEPEGAWAIAN

Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi BKPM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, 3 Kepala Bidang, masing-masing 2 Sub Bagian/Sub Bidang



Jumlah pegawai yang ada pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Desember 2014 berjumlah 43 orang yang terdiri dari 43 orang Pegawai Negeri Sipil dan 10 orang Pegawai Honorer kontak dengan komposisi pendidikan seperti Tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Pegawai dan Komposisi Pendidikan Per 31 Desember 2014

NO	TINGKAT	PNS	HONORER	JUMLAH
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	1
3	SLTA	12	9	21
4	SMEA	1	-	1
5	MAN	1	-	1
6	SARJANA MUDA	1	-	1
7	SARJANA (S1)	21	1	22
8	PASCA SARJANA (S2)	7	-	7
	JUMLAH	43	10	53

Tabel 3. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Per 31 Desember 2014

NO	JABATAN	ESELON	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	KEPALA	II.A	S2	1
2	SEKRETARIS	III.A	S2	1
3	KEPALA BIDANG	III.A	S1 S2	2 1
4	KASUB BAGIAN	IV.A	S1 S2	2 1
5	KASUB. BIDANG	IV.A	S1 S2	5 1
6	JABATAN FUNGSIONAL		SMEA SLTA SARJANA MUDA	- 1 -



7	Non Struktural dan Non Fungsional		S1 D3 SLTA MAN SLTP SD	13 1 12 1 - 1
	JUMLAH			43

Tabel 4. Jumlah PNS menurut Tingkat Golongan per 31 Desember 2014

NO	TINGKAT GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	GOLONGAN IV	6	
2	GOLONGAN III	27	
3	GOLONGAN II	10	
4	GOLONGAN I	-	
	JUMLAH	43	

Sumber : BKPM Pro, Kal.Sel, 2014

3. SARANA, PRASARANA DAN ASET

Sarana dan prasarana yang ada pada BKPM Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Desember 2014 adalah seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 5. Sarana dan prasarana yang ada per 31 Desember 2014

No	URAIAN	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1.	Gedung Kantor Permanen	1	Baik	1 Hibah dr BKPM, 1 dr Biro Perlengkapan
2.	Mini Bus (15 org kebawah)	5	Baik	
3.	Sepeda Motor	5	Baik	
4.	Mesin Tik	3	2 Baik, 1 Rusak	
5.	Almari Besi	9	4 Kurang	



			Baik, 5 Baik	
6.	Filling Besi	46	Baik	39 dari Biro Perlengkapan
7.	Brankas	2	Baik	
8.	Lemari Kaca	1	Baik	
9.	Alat Penyimpan Lainnya	1	Baik	dari Biro Perlengkapan
10.	Mesin Absensi	2	Baik	dari Biro Perlengkapan
11.	Alat Kantor Lainnya	2	Baik	In focus
12.	Alat Kantor lainnya	2	5 Baik, 4 Kurang Baik	Partisi
13.	Alat Kantor Lainnya	1	Baik	Wallpaper
14	Lemari Kayu	9	Baik	
15	Meja Rapat	17	Baik	dari Biro Perlengkapan
16	Meja Resepsionis	1	Baik	dr Biro Perlengkapan
17	Meja Tambahan	1	Baik	dari Biro Perlengkapan
18	Kursi Rapat	50	Baik	dr Biro Perlengkapan
19	Tikar	1	Baik	
20	Sofa	5	Baik	3 dari Biro Perlengkapan
21	Kaca Bening	3	4 Baik, 6 Rusak Berat	Dar1 Biro Perlengkapan
22	Karpet	4	Baik	
23	Jam Mekanis	10	5 Baik, 2 Rusak Berat	
24	Lemari Es	2	Baik	
25	Ac Split	7	Baik	
26	Kipas Angin	2	Baik	
27	Televisi	2	Baik	
28	Sound system	1	Baik	1 Paket dari Biro perlengkapan
29	Dispenser	1	Kurang Baik	
30	Alat Rumah Tangga	1	Kurang	Infokus



	Lainnya		Baik	
31	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Kurang Baik	Genset
32	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Kurang Baik	Mesin Pompa
33	Alat Rumah Tangga Lainnya	5	Kurang Baik	UPS
34	Alat Rumah Tangga Lainnya	5	Kurang Baik	Tahun 2010 (targa)
35	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik	Karpet
36	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik	Granit
37	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik	Credenza
38	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Baik	Backdroft
39	Komputer Lainnya/Jaringan Lainnya	1	Baik	Server
40	P.C Unit	36	31 Baik, 5 Rusak Berat	11 dari Biro Perlengkapan
41	Laptop	6	Baik	
42	Notebook	24	13 Baik, 11 Kurang baik	
43	Personal Komputer Lainnya	8	Baik	Apple dan Samsung
44	Harddisk	1	Baik	
45	Printer	26	20 Baik, 6 Rusak Berat	5 dari Biro Perlengkapan
46	Personal Komputer lainnya	25	Baik	Flasdisk dan tinta botol
47	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik	1 dari Biro Perlengkapan
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik	4 dari Biro Perlengkapan
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	14 Baik, 1 Rusak Berat	9 dari Biro Perlengkapan
50	Meja Kerja Non Struktural	39	Baik	35 dari Biro Perlengkapan



51	Meja Rapat Pejabat	11	Baik	dari Biro Perlengkapan
52	Kursi Pejabat Eselon II	2	1 Baik, 1 rusak berat	1 dari Biro Perlengkapan
53	Kursi Pejabat Eselon IV	18	Baik	13 dari Biro Perlengkapan
54	Kursi kerja Pejabat Non Struktural	78	Baik	dari Biro Perlengkapan
55	Kursi Tamu Diruang Pejabat Esselon	2	Baik	dari Biro Perlengkapan
56	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	47	Baik	dari Biro Perlengkapan
57	Kamera	2	Baik	dari Biro Perlengkapan
58	Peralatan Studio Visual	66	63 baik, 3 rusak berat	6 kamera, 2 Televisi, 58 dari Biro Perlengkapan

Sumber : BKPMMD Prov.Kalsel 2014



BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN URUSAN PENANAMAN MODAL

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 2 (dua) program urusan wajib penanaman modal dengan 9 (sembilan) kegiatan didukung dengan 5 (lima) program non urusan dengan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Total anggaran untuk Belanja Langsung pada BKPMMD tahun 2014 sebesar Rp 7.359.037.000,00 dengan rincian untuk belanja non urusan sebesar Rp 3.331.120.500,00 dan belanja urusan penanaman modal sebesar Rp 4.027.916.500,00.

Realisasi pelaksanaan kegiatan dengan anggaran tersebut adalah sebesar 80,96 % atau Rp 5.957.572.378,-. Adapun perincian realisasi anggaran dan kegiatan BKPMMD tahun 2014 terlampir.

Program dan kegiatan urusan penanaman modal daerah yang dilaksanakan BKPMMD tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan:	a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah b. Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal c. Penyelenggaraan Pameran Investasi d. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	



No	Uraian Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan:	a. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi b. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan d. Bimbingan Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal e. Penatalaksanaan dan Perencanaan Program	

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bidang teknis sesuai dengan tupoksinya. Adapun rincian dan penjelasan pelaksanaan kegiatan BKPMD tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut :

3.1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 500.000.000,- Dengan realisasi sebesar 52,43% atau Rp 262.100.000,-

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah cetakan	Keterangan
1	Mencetak buku potensi unggulan daerah	125 Buku	
2	Mencetak leaflet / brosur potensi unggulan daerah	2800 Lembar	7 komoditi x 400
3	Melaksanakan kegiatan SIPID	3 kali	2Bintek+1Magang
4	Buletin Warta Investasi	400 Exp	4 x 100 Exp



Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, output dan hasil yang didapat yaitu:

- a. Penyediaan informasi potensi, peluang investasi unggulan dan
- b. sarana pendukung seperti produk unggulan yang akan dapat meningkatkan investor ke Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1.1. Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 547.975.000,- Dengan realisasi sebesar 91,19 % atau Rp 499.702.450,-

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	Pelaksanaan kegiatan RKPPMD Tingkat Provinsi, kab/kota	1 kali	Banjarmasin
2	Partisipasi atau peserta aktif pada KP3MN KP3MR	1 kali	Manado

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, output dan hasil yang didapat yaitu:

- a. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal dengan terlaksananya kegiatan RKPPMD Tk. Provinsi,
- b. mengikuti kegiatan RKPPMD kab/kota, KP3MR, KP3MN.

3.1.2. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.108.400.000,- Dengan realisasi sebesar 74,04 % atau Rp 820.714.208.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan yakni keikutsertaan dalam pameran investasi baik yang bertaraf Nasional maupun Internasional. Pameran investasi dilaksanakan sebanyak 8 kali dengan berbagai tema acara. Adapun rincian keikutsertaan pameran pada tabel berikut:



No.	Acara	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1	Inovasi Sumatera dan Batam Trade Expo 2014	Batam	26 s/d 31 Maret 2014
2	Indonesia Product Expo and Tourism 2014	Bandung	14 s/d 19 Mei 2014
3	Senggigi Fair 2014	Lombok	18s/d 23 Juni 2014
4	Kalsel Expo	Banjarbaru	22 s/d 29 Agust 2014
5	Malang Investment Trade and Tourism Expo 2014	Malang	24 s/d 29 Sept 2014
6	Potensi Nusantara Expo 2014	Jogyakarta	29 s/d 3 Nov 2014
7	Kemilau Kaltim Nasional Expo 2014	Kaltim	11 s/d 17 Nov 2014
8	XO Babel 2014 In Conjunction With Sumatera TTI	Pangka Pinang Kep. Bangka Belitung	19 s/d 24 Nov 2014

Content stand pameran BKPM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

1. Buku potensi daerah
2. Leaflet / brosur potensi unggulan daerah
3. Buku profil investasi
4. Banner profil investasi

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, output dan hasil yang didapat yaitu:

- a. Terlaksananya pameran investasi dalam daerah maupun di luar daerah yang tentunya di harapkan dapat menarik investor untuk mau bergabung atau menanamkan investasi di daerah Kalimantan Selatan.
- b. Mempromosikan potensi yang ada di Kalimantan

3.2 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 315.100.000,- Dengan realisasi sebesar 94,53% atau Rp 297.853.400,-



Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

No	Uraian Kegiatan	Plafon	Realisasi	%
1	Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, target yang ditetapkan sebanyak 38 kali, realisasi sebanyak 39 kali (102,63%), Rencana alokasi anggaran perjalanan dinasnya (dalam daerah)	120.275.000	114.625.000	95,30
2	Pemantauan ke lapangan (perjalanan dinas dalamn daerah, target yang ditetapkan sebanyak 30 kali, realisasi sebanyak 27 kali (90,00 %).	305.940.000	60.283.800	19,70
3	Kegiatan perjalanan dinas luar daerah baik dalam rangka koordinasi, rapat-rapat dan peningkatan wawasan, target yang ditetapkan sebanyak 7 kali pertemuan, sedangkan realisasinya sebanyak 9 kali pertemuan (128,57 %).	171.200.000	159.463.100	93,14
4	Kegiatan lain yang dilakukan adalah membantu investor dalam pengisian dan penyampaian LKPM dan pengisian form aplikasi permohonan izin prinsip dan izin lainnya menghadiri rapat-rapat sumber dananya dari Dekon.			
5	Sebagai nara sumber dalam acara sosialisasi tatacara pengisian dan penyampaian LKPM.			



Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, output dan hasil yang didapat yaitu:

- a. tersedianya data hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan
- b. data hasil pemantauan ke lapangan terhadap proyek PMA/PMDN di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

3.3 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

No	Uraian Kegiatan	Plafon	Realisasi	%
1	Memfasilitasi dalam rangka kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) tingkat Provinsi dengan pengusaha nasional dan asing.	600.000.000	541.939.700	90,32
2	Memfasilitasi dalam rangka kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional.			

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, output dan hasil yang didapat yaitu: Terealisasinya pengembangan dan kerjasama penanaman modal perusahaan fasilitas dan non fasilitas.

3.4 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

No	Uraian Kegiatan	Plafon	Realisasi	%
1	Membuat website atau data informasi peluang investasi daerah Kalsel yang up to date	252.021.500	196.967.190	78,15



Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, output dan hasil yang didapat yaitu: Adanya kemudahan akses informasi penanaman modal dan peluang investasi di Kalimantan Selatan

3.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

No	Uraian Kegiatan	Plafon	Realisasi	%
1	Pengawasan dan pemantauan fasilitasi dan pelaksanaan ketentuan penanaman modal perusahaan PMA/PMDN di Kalsel	524.430.000	488.994.911	93,24
2	Pembuatan buku data-data perusahaan PMA/PMDN di Kalsel			
3	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penggunaan izin-izin yang sudah diterbitkan			
4	Pembuatan buku perkembangan Realisasi Investasi di Kalsel			

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, output dan hasil yang didapat yaitu:

- memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal,
- informasi masalah dan hambatan yg di hadapi para investor serta
- data-data PMA dan PMDN se Provinsi Kalimantan Selatan.

3.6 Bimbingan Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal

No	Uraian Kegiatan	Plafon	Realisasi	%
1	Mengikuti atau menghadiri rapat-rapat dan sosialisasi SPM dari Otda Kemendagri dan sosialisasi dari	301.270.000	273.855.734	90.90



2	BKPM maupun dari Biro organisasi. Kegiatan perjalanan dinas luar daerah baik dalam rangka koordinasi, rapat-rapat dan peningkatan wawasan, target yang ditetapkan	44.635.000 350.000.000	41.805.000 318.855.734	93.66 91.10
3	Rencana alokasi anggaran perjalanan dinasnya (dalam daerah)			
4	Membantu investor atau memberikan informasi kepada para investor dalam hal pengurusan perizinan bidang usaha penanaman modal.			
5	Bimbingan tentang tata cara pelayanan perizinan penanaman modal.			

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, output dan hasil yang didapat yaitu: Penyusunan SPM di bidang penanaman modal dan penyusunan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Badan Koordinasi Penanaman Modal Prov. Kalsel

3.7 Penatalaksanaan dan Perencanaan Program

No	Uraian Kegiatan	Plafon	Realisasi	%
1	Pembuatan Dokumen Lakip BKPM tahun 2014	67.800.000	26.205.011	38.65
2	Pembuatan Renstra, Renja, Laporan tahunan 2014			

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, indikator output kegiatannya adalah Tersusunnya Dokumen Lakip, Renstra, Renja dan Laporan Tahunan BKPM Tahun 2014.



BAB IV PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT (SOLUSI)

4.1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan sehingga hasil capaian dan realisasi penyerapan anggaran kurang optimal. Adapun berbagai permasalahan pada pelaksanaan setiap kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

No	Permasalahan	No	Rencana tindak lanjut
1	Dalam pengumpulan data ke kab/kota seringkali mereka tidak dapat memberikan data yang diminta	1	Menghimbau pihak perusahaan agar selalu aktif menyampaikan LKPM dalam rangka untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan perusahaan yang bersangkutan.
		2	Perlu peningkatan koordinasi terhadap kegiatan program APBD yang ada di SKPD Provinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten Kota.
		3	Mengkaji ulang potensi unggulan yang sudah ada yang kurang di minati



		4	investor Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah dengan mengadakan pendidikan/pelatihan, kursus-kursus, seminar dan atau penataran baik yang diselenggarakan oleh pusat maupun daerah.
--	--	---	--

2. Penyelenggaraan Pameran Investasi

No	Permasalahan	No	Rencana tindak lanjut
1	Pengetatan anggaran sehingga jumlah pameran di kurangi	1	Sesuai Permen 97 Tahun 2014, kantor perijinan (KP2T) bergabung menjadi satu atap dengan Badan Penanaman Modal (BKPM) Prov. Kalsel
2	Lahan untuk investasi yang belum jelas karena RTRW Kalsel yang belum selesai	2	Melakukan analisis dan evaluasi terhadap tupoksi yang dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat tumpang tindih, dan mengusulkan agar tupoksi tersebut disempurnakan.
3	Infrastruktur jalan dan komunikasi yang belum memadai	3	Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Aparatur dengan
4	Sebagian daerah belum memiliki data terakhir terkait potensi unggulan masing-masing daerah		
5	Kurangnya potensi SDM yang menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris.		



			<p>mengikuti Bintek yang sesuai dengan TUPOKSI, baik dalam Provinsi Kalsel maupun yang diadakan oleh Departemen yang membidangnya.</p> <p>4 Mengusulkan kepada Biro Perlengkapan Setda. Prov. Kalsel untuk dapat diberikan Kendaraan Operasional untuk mendukung optimalnya pelaksanaan tugas khususnya pegawai yang ada di Banjarmasin.</p>
--	--	--	--

3. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Permasalahan	No	Rencana tindak lanjut
1	Keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dalam upaya pengawasan dan pengendalian perusahaan	1	Perlunya tambahan SDM pada sub bidang pengawasan PM sehingga dapat meningkatkan kegiatan pengawasan penanaman modal
2	Terbatasnya sumber daya manusia sehingga kegiatan pengawasan PMA/PMDN belum optimal		



4. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

No	Permasalahan	No	Rencana tindak lanjut
1	Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena ada 2 instansi yang melaksanakan pembinaan sehingga BKPMMD sekedar untuk memfasilitasi saja.	1	Akan melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk memberikan kejelasan kewenangan masing-masing terhadap UKM, usaha mikro dan makro

5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

No	Permasalahan	No	Rencana tindak lanjut
1	Masih ada perusahaan yang tidak melaporkan LKPM	1	Sosialisasi/pembinaan terhadap PMA/PMDN
2	Terdapat perusahaan yang macet/tidak ada kegiatan	2	Rapat koordinasi pusat, pemprov dan pemkab / kota
3	Tumpang tindih lahan	3	Fasilitasi penyelesaian masalah
4	Data PMA / PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	4	Intensif LKPM secara online



6. Bimbingan Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal

No	Permasalahan	No	Rencana tindak lanjut
1	Regulasi di bidang penanaman modal antara pemerintah pusat dan daerah saling berbenturan	1	Adanya kesamaan regulasi di bidang PM baik pusat dan daerah
2	Pelayanan perizinan dan non perizinan masih berbelit-belit dan tidak transparan dengan waktu yang lama seta biaya tinggi	2	Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh PTSP agar pelayan perizinan dan non perizinan mudah capat, transparan dan tanpa pungutan biaya
3	Kelembagaan di bidang Penanaman Modal belum seragam antara Provinsi/Kab/Kota	3	SDM perlu diklat PTSP
4	Sumber daya manusia di bidang Penanaman modal masih belum optimal	3	Kesediaan lahan harus jelas di atur di dalam RTRW Prov/Kab
5	Kesediaan lahan untuk peruntukkan perusahaan para investor masih tumpang tindih	4	Jaminan kepastian hukum harus ditegakkan sesuai Peraturan dan Per UU yang berlaku
6	Tidak ada jaminan kepastian hukum bagi para investor yang menurunkan modalnya		



7. Penatalaksanaan dan Perencanaan Program

No	Permasalahan	No	Rencana tindak lanjut
1	RTRW Prov. Kalsel belum disahkan		
2	Penyusunan Rencana Kerja kegiatan belum sesuai tupoksi		
3	Karena terpisahnya kantor perijinan (KP2T) dengan badan penanaman modal (BKPM) Prov. Kalsel.		

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan didalam operasionalnya, sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang khusus untuk tahun 2014, telah direncanakan masing-masing.

Alokasi dan realisasi anggaran pada Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran

1. Belanja Tidak langsung yang terdiri :

- Belanja Gaji dan Tunjangan : Rp.11.122.334.000,-

2. Belanja Langsung yang terdiri dari :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 1.918.980.500,-

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 961.915.000,-

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. 72.650.000,-

- Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur : Rp. 287.750.000,-

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp. 89.825.000,-

- Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi : Rp. 2.233.665.000,-

- Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Inves. : Rp. 1.794.251.500,-

Jumlah Rp. 7.359.037.000,-



b. Realisasi Anggaran

1. Belanja Tidak langsung yang terdiri :

- Belanja Gaji dan Tunjangan : Rp. 9.517.036.858,-

2. Belanja Langsung yang terdiri dari :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 1.334.999.678-
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 857.503.847,-
 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp. 67.950.000,-
 - Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur : Rp. 185.916.910 ,-
 - Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp. 73.597.150,-
 - Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi : Rp. 1.864.643.058,-
 - Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Inves. : Rp. 1.572.962.535,-
- Jumlah Rp.5.957.573.178,-



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Tahunan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ini memuat uraian kegiatan yang diselenggarakan selama tahun 2014, dengan acuan program-program yang disusun sebelumnya yaitu Rencana Kerja Badan dan Kesepakatan atau Kontrak Kerja dengan Gubernur Kalimantan Selatan dalam rangka Good Governance. Terlaksananya kegiatan dan program karena adanya dukungan dan koordinasi dari SKPD terkait dan kesiapan personil internal Badan. Meskipun terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, namun dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sehingga pembinaan iklim berinvestasi di daerah ini terselenggara dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari segi alokasi pendanaan tidak seluruhnya terealisasi dalam akhir tahun anggaran, hal ini dilakukan dalam upaya efisiensi dengan tetap mengoptimalkan kinerja.

B. Saran

Hasil yang telah dicapai dalam Tahun 2014 dan berbagai upaya pemecahan permasalahan, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan rencana peningkatan kinerja tahun yang akan datang bagi seluruh jajaran di Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.



Demikian pula beberapa kekurangan yang terjadi sebagai umpan balik untuk lebih memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2015.